

## Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Gampong Meunasah Tuha Berperspektif Modal Sosial

**Evalina Zuraidi\*, Siti Zahrina Fakhrana, Cut Fathyah Rahmadina, Safira Santi, Fahrul Razi, M. Ridho  
Firdaus, Cut Nur Qathrun Nada TA, Afriani**

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 23117,  
Indonesia

\*corresponding author: [evalinaz@usk.ac.id](mailto:evalinaz@usk.ac.id)

**Received:** Nov 24, 2025; **Revised:** Dec 9, 2025; **Accepted:** Dec 16, 2025; **Published:** Dec 22, 2025.

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan gampong untuk memiliki dokumen rencana pengembangan yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa, namun sekaligus mencerminkan kekhasan modal sosial masyarakat lokal. Gampong Meunasah Tuha memiliki jaringan kelembagaan dan tradisi gotong royong yang kuat, tetapi dokumen perencanaannya belum secara eksplisit mengintegrasikan perspektif modal sosial. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi penyusunan dokumen rencana pengembangan gampong yang komprehensif dan berperspektif modal sosial. Metode yang digunakan mengadopsi pendekatan partisipatif melalui studi dokumen, observasi lapangan terbatas, wawancara semi-terstruktur, diskusi kelompok terfokus, serta analisis deskriptif kualitatif yang diperkaya dengan analisis SWOT dan analisis akar masalah. Hasil kegiatan menunjukkan tersusunnya dokumen rencana pengembangan Gampong Meunasah Tuha yang memuat gambaran umum, analisis kondisi, visi–misi, rencana struktur dan pola ruang, rencana pengembangan social capital dan ekonomi lokal, serta rencana dan indikasi program. Proses fasilitasi melibatkan pemerintah gampong dan berbagai lembaga lokal sehingga memperkuat partisipasi dan rasa memiliki terhadap dokumen. Disimpulkan bahwa fasilitasi penyusunan rencana pengembangan berperspektif modal sosial efektif sebagai instrumen untuk mengaitkan potensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan lokal dengan arah pembangunan gampong yang lebih terarah dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perencanaan gampong; Modal sosial; Perencanaan partisipatif; Studio perencanaan desa.

### **Abstract**

This community service programme was driven by the need for village governments to have development planning documents that comply with the Village Law while, at the same time, reflecting the specific social capital of local communities. Gampong Meunasah Tuha has relatively strong local institutions and traditions of mutual cooperation; however, its existing planning documents do not explicitly integrate a social capital perspective. This article describes the facilitation process for preparing a comprehensive village development plan for Meunasah Tuha that is grounded in social capital. A participatory approach was applied through document review, limited field observations, semi-structured interviews, focus group discussions (FGDs), and qualitative descriptive analysis supported by SWOT and root cause analyses. The activity produced a village development plan that includes an overview of the village, a situation analysis, the vision and mission, spatial structure and land-use plans, plans for developing social capital and the local economy, as well as a set of indicative programmes. The facilitation process involved the village government and various local institutions, thereby strengthening participation and building a shared sense of ownership of the document. It can be concluded that facilitating a social capital-oriented village development plan is an effective instrument for linking local social, economic, and institutional potentials with a more directed and sustainable village development trajectory.

**Keywords:** Village planning; Social capital; Participatory planning; Studio-based community service.



This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 1. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam Tridharma Perguruan Tinggi, sejajar dengan pendidikan dan penelitian. Melalui pengabdian, perguruan tinggi diharapkan berkontribusi langsung dalam penyelesaian persoalan nyata di masyarakat, sekaligus mentransformasikan pengetahuan dan teknologi agar lebih membumi di tingkat lokal. Dalam konteks ini, fasilitasi perencanaan pembangunan desa/gampong menjadi salah satu bentuk pengabdian strategis karena berkaitan langsung dengan tata kelola sumber daya dan arah pembangunan jangka menengah–panjang di tingkat akar rumput.

Secara normatif, kerangka perencanaan pembangunan desa di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksananya. Pemerintah desa diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk periode enam tahun, yang dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa, pengambilan keputusan pembangunan, serta alat untuk memastikan akuntabilitas pemanfaatan dana desa [1,2].

Gampong Meunasah Tuha merupakan salah satu gampong pesisir di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dengan luas wilayah sekitar 0,81 km<sup>2</sup> dan karakteristik lahan yang didominasi area persawahan tada hujan serta kawasan pesisir. Keterbatasan ketersediaan air irigasi menyebabkan sebagian masyarakat beralih ke sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), antara lain produksi sale pisang, kerupuk terasi, dan berbagai olahan pangan lokal yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Di sisi lain, gampong ini memiliki sejarah sosial budaya yang kuat, ditandai dengan tradisi gotong royong, pengajian, dan berbagai kegiatan sosial keagamaan yang selama ini menjadi dasar interaksi sosial warga.

Dari sisi kelembagaan, Gampong Meunasah Tuha memiliki struktur kelembagaan yang relatif lengkap, terdiri atas pemerintah gampong, tuha peut, lembaga adat, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), kelompok pemuda, kelompok tani, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Struktur kelembagaan ini membentuk jaringan hubungan internal–eksternal yang cukup kuat dan berpotensi menjadi basis penguatan modal sosial gampong. Namun demikian, beberapa lembaga mengalami penurunan tingkat keaktifan, terutama PKK dan Posyandu, serta belum terdapat kelembagaan khusus yang secara konsisten mendampingi sektor UMKM. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sosial-ekonomi dan kelembagaan yang tersedia dengan kapasitas perencanaan dan pengelolaan program pembangunan yang terarah.

Dokumen RPJM Gampong Meunasah Tuha Tahun 2018–2023 telah disusun secara partisipatif dan memuat arah kebijakan serta program pembangunan gampong. Namun, dokumen tersebut belum secara eksplisit mengartikulasikan modal sosial sebagai basis utama pengembangan gampong, khususnya dalam mengintegrasikan penguatan kelembagaan sosial, UMKM, dan pengelolaan sumber daya lokal ke dalam satu rencana pengembangan jangka panjang yang komprehensif. Laporan Perencanaan Desa yang disusun sebelumnya telah memperkaya pemahaman mengenai kondisi eksisting, sejarah, dan dinamika sosial-ekonomi Gampong Meunasah Tuha, serta merumuskan berbagai analisis dan strategi pengembangan. Akan tetapi, temuan-temuan tersebut masih memerlukan proses fasilitasi lanjutan agar terformulasi dalam bentuk dokumen rencana pengembangan gampong yang lebih operasional dan disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan di gampong.

Secara teoritis, modal sosial dipahami sebagai jaringan hubungan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama. Putnam menekankan bahwa tradisi kewargaan, kepercayaan, dan jejaring sosial yang kuat berkontribusi pada kinerja kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan kolektif [3]. Bourdieu dan Coleman, di sisi lain, menyoroti modal sosial sebagai sumber daya yang tertanam dalam struktur sosial dan dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan individu maupun kolektif [4–6]. Dalam konteks Gampong Meunasah Tuha, tradisi gotong royong, kepemimpinan lokal, dan keragaman kelembagaan merupakan bentuk modal sosial yang berpotensi besar untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan gampong.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini berfokus pada fasilitasi penyusunan dokumen rencana pengembangan Gampong Meunasah Tuha berperspektif modal sosial. Mitra utama kegiatan adalah Pemerintah Gampong Meunasah Tuha beserta lembaga-lembaga gampong yang relevan. Bentuk kegiatan bukan berupa pelaksanaan program fisik, melainkan pendalaman analisis dan perumusan dokumen rencana pengembangan yang: (1) berangkat dari kondisi eksisting dan potensi gampong; (2) mengidentifikasi hambatan pengembangan gampong berbasis modal sosial; dan (3) merumuskan arah pengembangan, program, dan indikasi kegiatan yang memperkuat jaringan sosial, kelembagaan lokal, dan UMKM.

Tujuan utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) memfasilitasi pemerintah Gampong Meunasah Tuha beserta unsur masyarakat dalam menyusun dokumen rencana pengembangan gampong yang komprehensif dan kontekstual sebagai luaran utama program pengabdian; (2) mengintegrasikan perspektif modal sosial ke dalam struktur dan substansi rencana pengembangan gampong sehingga memberikan kontribusi nyata bagi penguatan perencanaan pembangunan di tingkat lokal; dan (3) memperkuat kapasitas perencanaan serta praktik pengelolaan pembangunan gampong melalui proses pendampingan dan belajar bersama yang partisipatif antara tim pengabdi dan para pemangku kepentingan di gampong. Dengan demikian, artikel pengabdian masyarakat ini mendokumentasikan proses fasilitasi, bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan, produk dokumen rencana yang dihasilkan, serta pelajaran yang dapat diambil untuk pengembangan model pengabdian serupa di gampong lain.

## 2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memadukan pendekatan perencanaan partisipatif dan analisis perencanaan teknis yang sebelumnya telah dilakukan dalam kerangka Studio Perencanaan Desa. Pendekatan tersebut mengadaptasi prinsip-prinsip *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, yakni memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk berbagi, menganalisis, dan merumuskan rencana berbasis pengalaman dan aspirasi mereka sendiri [7].

### A. Desain Kegiatan Pengabdian

Kegiatan dirancang sebagai fasilitasi penyusunan dokumen rencana pengembangan gampong, dengan posisi tim pengabdi sebagai fasilitator dan penyusun teknis, sedangkan pemangku kepentingan gampong berperan sebagai sumber informasi utama dan pengambil keputusan substantif. Proses fasilitasi dilakukan secara bertahap untuk:

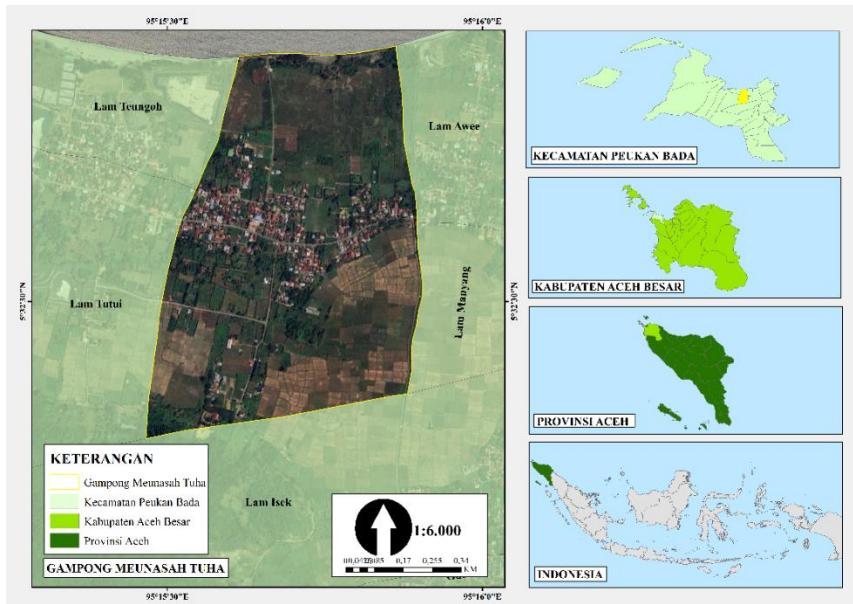
1. mengkompilasi dan menata kembali hasil analisis situasi dan perencanaan yang telah dilakukan dalam Perencanaan Desa;
2. mengkonfirmasi dan memperkaya temuan melalui diskusi dengan mitra;
3. menyusun kerangka dan isi dokumen rencana pengembangan gampong; dan
4. melakukan validasi dan penyempurnaan dokumen bersama mitra.

### B. Lokasi dan Waktu

Kegiatan dilaksanakan di Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Gampong ini termasuk dalam Kemukiman Aneuk Batee dengan luas wilayah 0,81 km<sup>2</sup> dan batas administratif dengan Gampong Lam Awe, Lam Tutui, Lam Manyang, dan Lam Teungoh (**Gambar 1**). Fasilitasi penyusunan dokumen dilakukan dalam rentang waktu Januari–Mei 2025, yang meliputi tahap pra-survei, survei, pasca-survei, dan finalisasi laporan.

### C. Mitra dan Peserta Kegiatan

Mitra utama kegiatan adalah Pemerintah Gampong Meunasah Tuha (keuchik, aparatur gampong, dan tuha peut). Peserta lain yang dilibatkan meliputi perwakilan lembaga adat, BUMG, kelompok pemuda, kelompok tani, PKK, kader Posyandu, pelaku UMKM, serta tokoh masyarakat setempat. Komposisi peserta ini dipilih untuk memastikan bahwa dokumen rencana pengembangan yang disusun mencerminkan berbagai kepentingan dan perspektif, khususnya terkait penguatan modal sosial dan pengembangan ekonomi lokal.



**Gambar 1.** Lokasi Pengabdian di Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

### D. Tahapan Kegiatan

Secara garis besar, metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas lima tahapan utama:

#### 1. Tahap Persiapan

- Koordinasi awal dengan pemerintah gampong untuk menyepakati tujuan, ruang lingkup, dan jadwal kegiatan.
- Inventarisasi dokumen perencanaan yang telah ada (RPJMG 2018–2023, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan dokumen terkait lainnya).
- Penyusunan kerangka awal dokumen rencana pengembangan gampong berperspektif modal sosial berdasarkan hasil studi sebelumnya.

#### 2. Tahap Pengumpulan dan Verifikasi Data

- Observasi lapangan terbatas untuk memverifikasi perubahan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi gampong.
- Wawancara semi-terstruktur dengan keuchik, aparatur gampong, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan untuk mengkonfirmasi temuan analisis sebelumnya dan mengidentifikasi isu terkini.

- *Focus Group Discussion (FGD)* atau diskusi kelompok terarah untuk menguji kembali rumusan potensi, masalah, dan isu strategis terkait modal sosial, kelembagaan, dan UMKM.

### 3. Tahap Analisis dan Perumusan Rencana

- Pengolahan dan sintesis data hasil observasi, wawancara, dan FGD dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis SWOT, serta Analisis Akar Masalah (*Root Cause Analysis*).
- Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan gampong yang menempatkan modal sosial sebagai basis utama pengembangan.
- Penyusunan matriks program dan indikasi kegiatan pengembangan gampong yang memadukan penguatan kelembagaan sosial, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas sarana pelayanan publik, serta pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi.

### 4. Tahap Penyusunan Dokumen

- Penyusunan draft dokumen rencana pengembangan gampong yang sistematis, mencakup: pendahuluan; gambaran umum dan analisis kondisi; analisis modal sosial; visi, misi, tujuan, dan strategi; program dan indikasi kegiatan; serta indikator keberhasilan.
- Integrasi perspektif modal sosial ke dalam seluruh bab, baik melalui penekanan pada jaringan kelembagaan, tradisi gotong royong, maupun mekanisme partisipasi warga.

### 5. Tahap Validasi dan Finalisasi

- Presentasi draft dokumen kepada pemerintah gampong dan perwakilan lembaga kemasyarakatan dalam forum diskusi terbatas.
- Pengumpulan masukan terkait kelayakan program, prioritas, dan kesesuaian dengan kapasitas kelembagaan serta sumber pembiayaan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber lain).
- Penyempurnaan dokumen dan penyerahan kepada pemerintah gampong sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan resmi (RPJMG/RKP Gampong) pada periode berikutnya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- Studi Dokumen

Mengkaji RPJMG Gampong Meunasah Tuha 2018–2023, dokumen statistik BPS, RTRW Kabupaten Aceh Besar, serta laporan Perencanaan Desa sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan gampong.

- Observasi Lapangan

Observasi kondisi fisik permukiman, sarana pemerintahan, sarana sosial keagamaan, fasilitas kesehatan, dan lokasi aktivitas UMKM untuk memastikan kesesuaian dengan data sekunder (**Gambar 2**).

- Wawancara Semi-terstruktur

Wawancara dengan pemerintah gampong, pengurus BUMG, pengelola UMKM, pengurus PKK, dan kader Posyandu untuk menggali informasi mengenai dinamika kelembagaan, tantangan operasional, dan harapan terhadap rencana pengembangan gampong.

- FGD dan PRA

FGD tematik dan teknik PRA (pemetaan partisipatif, penelusuran sejarah desa, analisis mata pencarian dan kelembagaan, kalender musim, serta bagan kegiatan harian) digunakan untuk memvalidasi temuan, mengidentifikasi modal sosial kunci, dan memetakan hubungan antar-kelembagaan di Gampong Meunasah Tuha.



**Gambar 2.** Kegiatan FGD di Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

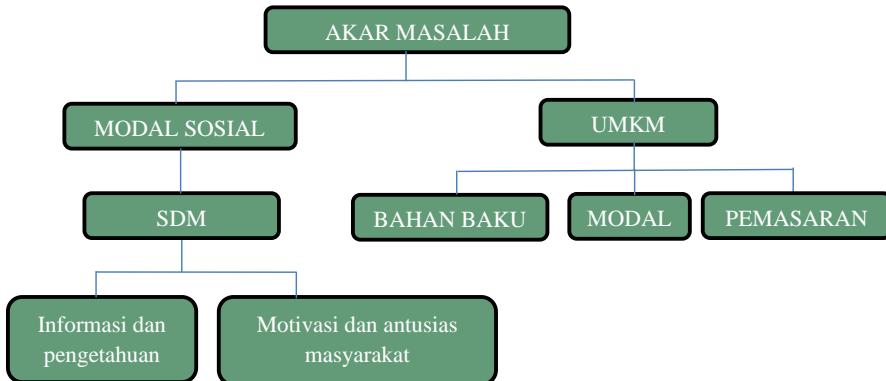
#### F. Teknik Analisis dan Indikator Keberhasilan

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi eksisting, dinamika sosial-ekonomi, dan profil modal sosial gampong; didukung analisis kuantitatif sederhana (misalnya proyeksi penduduk, kebutuhan sarana, dan kapasitas pelayanan). Analisis SWOT (**Tabel 1**) digunakan untuk merumuskan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan gampong berbasis modal sosial, sedangkan *Root Cause Analysis* dimanfaatkan untuk menelusuri akar permasalahan kunci yang menghambat penguatan modal sosial dan UMKM (**Gambar 3**). Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian meliputi:

1. tersusunnya dokumen rencana pengembangan Gampong Meunasah Tuha yang komprehensif, terstruktur, dan dapat digunakan sebagai rujukan resmi;
2. terintegrasi perspektif modal sosial secara eksplisit dalam dokumen (melalui rumusan visi, strategi, dan program yang memperkuat jaringan sosial serta kelembagaan gampong); dan
3. adanya kesepahaman bersama di antara pemangku kepentingan gampong mengenai prioritas pengembangan dan peran masing-masing lembaga dalam implementasi rencana. [2].

**Tabel 1.** Matriks analisis SWOT.

FAKTOR	<i>STRENGTHS (S)</i>	<i>WEAKNESSES (W)</i>
Internal	1. Hubungan antar masyarakat yang sangat erat (FGD). 2. Masyarakat dengan multipekerjaan (wawancara). 3. Kelembagaan yang aktif sehingga dapat memberdayakan masyarakat (FGD, wawancara). 4. Terdapat berbagai jenis UMKM yang berkembang di gampong (FGD, wawancara). 5. Lokasi yang strategis, berada di jalur menuju lokasi wisata (observasi).	1. Kurangnya modal dan bahan baku (wawancara). 2. Proses pemasaran yang kurang baik (wawancara). 3. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal (wawancara). 4. Multipekerjaan berupa buruh dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (wawancara). 5. Kurangnya motivasi, pengetahuan dan informasi (wawancara). 6. Kurangnya kerjasama dengan pihak eksternal (FGD, wawancara)
Eksternal		
<b>OPPORTUNITIES (O)</b>	<b>STRATEGI S-O</b>	<b>STRATEGI W-O</b>
1. Meningkatkan perekonomian gampong 2. Target pasar yang luas, untuk berbagai kalangan 3. Produk yang unik, sehingga dapat menarik minat pembeli. 4. Penjualan produk dapat dilakukan secara online.	1. Meningkatkan pemasaran produk UMKM dengan memanfaatkan hubungan erat antar masyarakat dan kelembagaan aktif. 2. Memanfaatkan lokasi yang strategis untuk memperluas pasar produk dengan membangun jaringan pemasaran di sekitar jalur wisata. 3. Mengoptimalkan keunikan produk gampong untuk menarik minat pasar yang lebih luas. 4. Bekerjasama dengan pihak pemandu wisata untuk menyusun program paket wisata desa berbasis produk lokal sehingga menarik konsumen langsung ke lokasi. 5. Membuat program pelatihan manajemen waktu dan pengelolaan multipekerjaan agar masyarakat tetap produktif dalam usaha sampingan. 6. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian gampong.	1. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi serta pemasaran digital untuk mengatasi keterbatasan modal dan memperluas pemasaran. 2. Membangun pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan motivasi dan pengetahuan masyarakat. 3. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk memperluas akses pasar dan sumber daya. 4. Membuka akses pendanaan alternatif melalui kerjasama dengan pihak eksternal. 5. Membentuk program untuk mendukung UMKM dalam pengembangan produk dan pemasaran. 6. Memperbaiki strategi pemasaran untuk meningkatkan perekonomian gampong. 7. Mendorong pengembangan platform digital lokal untuk memasarkan produk unggulan gampong.
<b>THREATS (T)</b>	<b>STRATEGI S-T</b>	<b>STRATEGI W-T</b>
1. Lokasi gampong yang terletak berdekatan dengan laut sehingga rawan bencana (observasi). 2. Pelaku usaha menghasilkan produk serupa. 3. Persaingan dengan pelaku usaha lain.	1. Memperkuat daya saing produk melalui inovasi berbasis potensi lokal. 2. Memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui kerjasama antar masyarakat. 3. Mendorong kolaborasi antar UMKM untuk menghadapi persaingan pasar. 4. Membuat SOP (Standard Operating Procedure) darurat bencana untuk UMKM di gampong. 5. Mengembangkan UMKM yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana sehingga dapat mengurangi dampak ekonomi akibat bencana.	1. Memperbaiki kualitas produk dan pelayanan untuk bersaing dengan produk serupa. 2. Mengembangkan sistem mitigasi risiko terhadap bencana dalam operasional usaha. 3. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap persaingan. 4. Mengadopsi sistem kolaborasi produksi antar pelaku usaha untuk mengurangi kerentanan terhadap persaingan individu. 5. Mengembangkan program pelatihan dan pendampingan usaha agar UMKM lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan bencana alam.



**Gambar 3.** Analisis Akar masalah (*Root Cause Analysis*)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

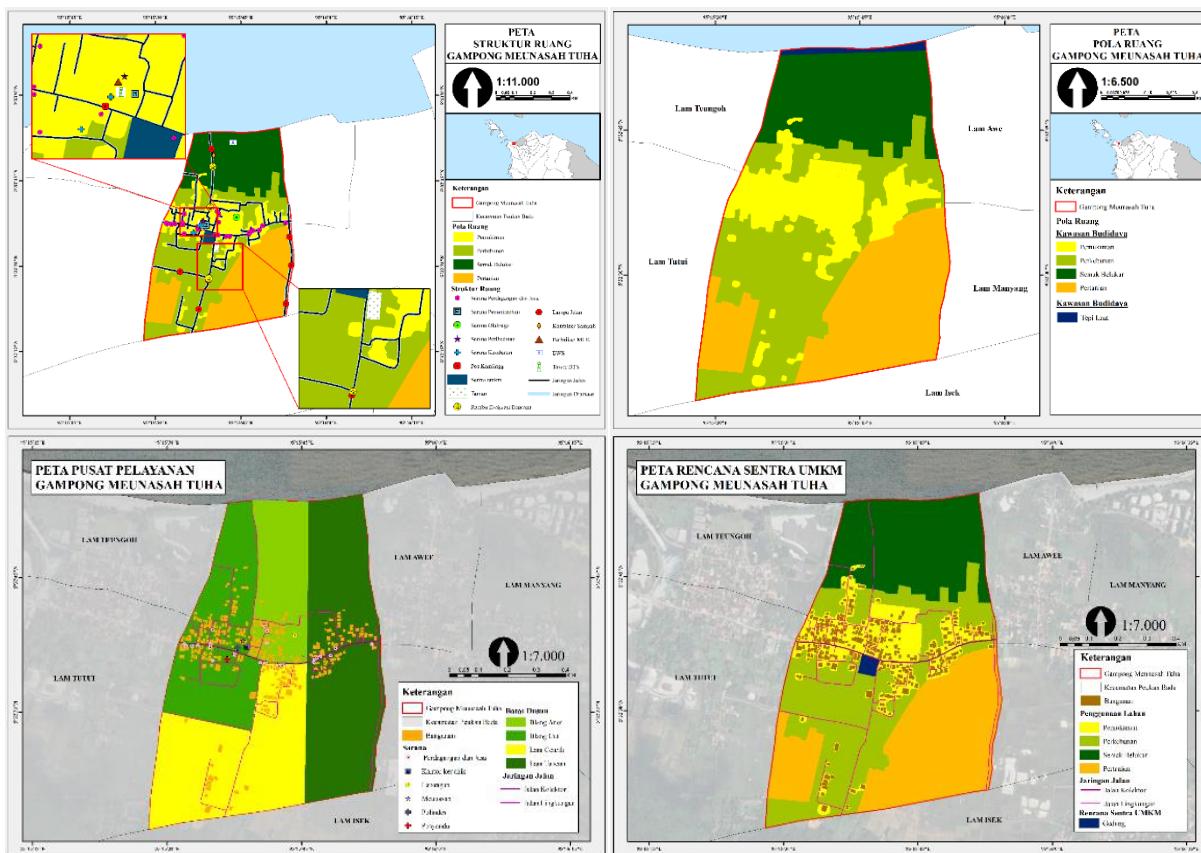
#### A. Produk Utama: Dokumen Rencana Pengembangan Gampong

Hasil utama kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya Dokumen rencana pengembangan Gampong Meunasah Tuha yang terstruktur dan dapat berfungsi sebagai rujukan substantif dalam penyusunan dokumen perencanaan formal gampong (RPJMG dan RKP Gampong) (**Gambar 4**). Dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan hasil analisis Perencanaan Desa dan proses fasilitasi lanjutan bersama pemerintah gampong serta lembaga-lembaga lokal. Secara garis besar, dokumen rencana pengembangan gampong memuat beberapa bagian pokok, yang meliputi: (1) pendahuluan dan gambaran umum gampong; (2) fakta dan analisis perencanaan (fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan); (3) visi, misi, arah kebijakan, serta pengembangan konsep modal sosial; (4) rencana struktur ruang (pusat pelayanan dan jaringan prasarana); (5) rencana pola ruang; (6) rencana pengembangan modal sosial dan ekonomi gampong; serta (7) rencana dan indikasi program.

Pada bagian fakta dan analisis perencanaan, dokumen memuat profil fisik Gampong Meunasah Tuha sebagai gampong pesisir dengan dominasi persawahan tada hujan dan keterbatasan irigasi, yang berdampak pada pola mata pencaharian warga yang banyak beralih ke sektor UMKM. Analisis sosial-ekonomi menunjukkan adanya keragaman tingkat pendidikan, dominasi kerja di sektor informal, serta tumbuhnya berbagai UMKM berbasis olahan pangan lokal (sale pisang, kerupuk terasi, bakpia, dan lain-lain) yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi gampong. Dari sisi kelembagaan, dokumen menggambarkan keberadaan lembaga-lembaga kunci seperti pemerintah gampong, tuha peut, lembaga adat, BUMG, kelompok pemuda, kelompok tani, PKK, dan Posyandu, serta sarana sosial seperti meunasah, kantor keuchik, gedung PKK, dan posyandu. Jaringan kelembagaan ini menjadi salah satu dasar penetapan modal sosial sebagai perspektif utama dalam perumusan rencana pengembangan. Selanjutnya, dokumen memuat rencana pengembangan sektoral yang terhubung dengan penguatan modal sosial, antara lain:

- rencana pengembangan UMKM dan kelembagaan ekonomi lokal,
- rencana pengembangan kelembagaan sosial dan kapasitas sumber daya manusia,
- rencana pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, ruang publik, dan prasarana permukiman),
- serta rencana dan indikasi program yang dirinci dalam tabel rencana program dan indikasi program jangka menengah.

Rangkaian rencana tersebut menunjukkan bahwa produk kegiatan bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan kerangka pengembangan gampong yang menghubungkan dimensi ruang, ekonomi, dan sosial dengan basis modal sosial yang telah diidentifikasi sebelumnya.



Gambar 4. Peta-peta Pengembangan Gampong Meunasah Tuha

## B. Integrasi Perspektif Modal Sosial dalam Dokumen Rencana

Salah satu capaian penting dari proses fasilitasi adalah terintegrasinya perspektif modal sosial secara eksplisit ke dalam dokumen rencana pengembangan gampong. Hal ini tampak pada beberapa lapisan substansi:

### 1. Analisis Akar Masalah dan SWOT berbasis modal sosial

Dokumen memuat analisis akar masalah yang menempatkan lemahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan minimnya dukungan bagi UMKM sebagai akar persoalan pengembangan modal sosial di Gampong Meunasah Tuha. Analisis tersebut dilanjutkan dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan berupa solidaritas sosial yang tinggi, kelembagaan yang relatif lengkap, dan keberadaan berbagai UMKM, sekaligus kelemahan berupa keterbatasan modal, bahan baku, dan pemasaran.

### 2. Perumusan konsep dan rencana pengembangan modal sosial

Dokumen secara khusus memuat bab mengenai pengembangan konsep modal sosial dan rencana pengembangan modal sosial dan ekonomi gampong yang mencakup:

- penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan lokal melalui pelatihan, pendidikan informal, dan penguatan karakter;
- pengembangan ekonomi berbasis UMKM, pertanian, dan perkebunan;
- penguatan daya saing dan jaringan kerja sama melalui asosiasi UMKM, kemitraan dengan pihak eksternal, dan promosi potensi lokal.

### 3. Rencana dan indikasi program berbasis jaringan, kepercayaan, dan norma

Dalam tabel rencana program dan indikasi program, modal sosial tidak hanya muncul sebagai latar belakang konseptual, tetapi diterjemahkan ke dalam program-program seperti penguatan kapasitas lembaga lokal, pembentukan forum komunikasi pelaku usaha, pengembangan kegiatan bersama berbasis gotong royong, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan ekonomi lokal. Jika dirujukkan pada literatur, pendekatan ini selaras dengan pandangan Putnam bahwa modal sosial, dalam bentuk jaringan, norma, dan kepercayaan, berkontribusi pada kinerja kelembagaan dan kapasitas kolektif untuk bertindak [8]. Sementara itu, penekanan pada penguatan lembaga lokal, asosiasi UMKM, dan forum warga sejalan dengan pandangan Bourdieu tentang modal sosial sebagai sumber daya yang tertanam dalam jaringan relasi, yang dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan tertentu [9]. Dengan demikian, dokumen rencana pengembangan Gampong Meunasah Tuha tidak hanya menyebut modal sosial sebagai “nilai tambah” abstrak, melainkan mengoperasionalkannya dalam bentuk program dan institusi yang dapat diperkuat secara bertahap oleh gampong.

## C. Dinamika Proses Fasilitasi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan

Dari perspektif proses, fasilitasi penyusunan dokumen rencana pengembangan gampong menunjukkan beberapa dinamika penting. Keterlibatan perangkat gampong, tuha peut, lembaga adat, BUMG, PKK, pemuda, kader Posyandu, dan pelaku UMKM dalam diskusi dan FGD memungkinkan terjadinya verifikasi silang terhadap hasil analisis studio yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada tahap awal, partisipasi cenderung lebih didominasi oleh aparatur gampong dan tokoh formal. Namun melalui beberapa pertemuan, diskusi mulai melibatkan pelaku UMKM, kelompok perempuan, dan pemuda, terutama ketika pembahasan menyentuh rencana pengembangan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan sosial. Proses ini sejalan dengan prinsip PRA, yakni memposisikan masyarakat lokal sebagai subjek utama yang merefleksikan kondisi mereka sendiri dan merumuskan rencana secara kolektif [10]. Secara praktis, dinamika ini menghasilkan beberapa pembelajaran:

### 1. Rekognisi terhadap pengetahuan lokal

Informasi mengenai sejarah gampong, praktik gotong royong, dinamika lembaga keagamaan dan adat, hingga pola jaringan usaha UMKM diperoleh bukan hanya dari dokumen sekunder, tetapi juga dari narasi warga yang diungkapkan dalam diskusi. Hal ini memperkaya pemahaman tim pengabdi dan membantu memperhalus rumusan program agar lebih sesuai dengan kultur lokal.

### 2. Negosiasi prioritas antaraktor

Perbedaan pandangan antara kelompok yang menginginkan fokus pada perbaikan infrastruktur dasar dengan kelompok yang menekankan penguatan UMKM dan lembaga sosial menjadi ruang negosiasi yang penting. Fasilitasi dilakukan untuk menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek (infrastruktur dan layanan dasar) dengan penguatan basis modal sosial yang berdampak jangka

panjang, sebagaimana tercermin dalam kombinasi rencana pengembangan sarana permukiman dan rencana pengembangan modal sosial–ekonomi.

3. Penguatan rasa memiliki terhadap dokumen

Dengan dilibatkannya pemangku kepentingan dalam proses verifikasi data dan perumusan program, dokumen rencana tidak dipersepsikan sebagai “produk eksternal” milik perguruan tinggi, tetapi sebagai rujukan bersama yang dapat diacu dalam proses musyawarah gampong dan penyusunan dokumen resmi ke depan. Hal ini tercermin dari kesediaan pemerintah gampong untuk menggunakan rencana dan indikasi program sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran berbasis APBG dan sumber pendanaan lainnya.

#### **D. Implikasi dan Pembahasan Kritis**

Dari sisi konseptual, hasil pengabdian ini memperlihatkan bagaimana modal sosial dapat dijadikan perspektif pengikat antara analisis situasi, perumusan visi-misi, dan penyusunan program di tingkat gampong. Hal ini menguatkan argumen bahwa modal sosial bukan sekadar atribut kultural, melainkan variabel perencanaan yang dapat dioperasionalkan melalui penguatan jaringan, norma, dan kepercayaan dalam desain kelembagaan dan program pembangunan [11,12]. Dari sisi praktik perencanaan, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa studio perencanaan desa di perguruan tinggi dapat diperluas menjadi model pengabdian berbasis studio (*studio-based community service*). Studio tidak berhenti pada penyusunan laporan akademik, tetapi dilanjutkan dengan fasilitasi penyusunan dokumen rencana pengembangan yang lebih operasional dan dapat digunakan oleh gampong. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian di Gampong Leungah Aceh Besar yang menggunakan pendekatan PRA untuk menguatkan kapasitas perencanaan dan kelembagaan lokal dalam penyusunan dokumen perencanaan desa [13]. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis:

1. Keterbatasan waktu dan intensitas pendampingan

Kegiatan fasilitasi yang berjalan paralel dengan jadwal studio menyebabkan intensitas pertemuan dengan mitra masih terbatas. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya penyusunan mekanisme implementasi dan monitoring rencana di tingkat gampong.

2. Belum terintegrasi penuh ke dalam dokumen perencanaan resmi

Meskipun dokumen rencana pengembangan telah diserahkan dan diakui sebagai bahan rujukan, proses formalisasi menjadi RPJMG atau revisi dokumen perencanaan gampong tetap memerlukan mekanisme musyawarah dan prosedur administratif tersendiri. Dokumen ini dapat dipandang sebagai intermediate planning document yang menunggu proses adopsi formal oleh lembaga perencanaan gampong.

3. Keterbatasan pengukuran dampak modal sosial

Penguatan modal sosial dalam rencana lebih banyak diukur melalui indikator kualitatif (partisipasi, kepercayaan, intensitas kolaborasi) dan indikator keluaran program (jumlah pelatihan, forum, atau kemitraan). Belum dilakukan pengukuran longitudinal terhadap perubahan modal sosial setelah implementasi program, sebagaimana juga menjadi catatan dalam sejumlah kajian PRA dan penguatan modal sosial yang menekankan pentingnya evaluasi jangka panjang [7].

Terlepas dari keterbatasan tersebut, pengalaman fasilitasi ini menunjukkan bahwa integrasi studio perencanaan desa dengan kegiatan pengabdian memungkinkan terbentuknya siklus pembelajaran yang saling menguatkan antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Bagi perguruan tinggi, kegiatan ini memberikan contoh konkret bagaimana teori modal sosial dan perencanaan partisipatif dapat diujicobakan pada konteks gampong, sementara bagi Gampong Meunasah Tuha, kegiatan ini menghasilkan dokumen rencana pengembangan sebagai dasar untuk memperkuat arah pembangunan berbasis modal sosial di masa mendatang.

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa fasilitasi penyusunan rencana pengembangan Gampong Meunasah Tuha berperspektif modal sosial memberikan dampak positif bagi gampong maupun perguruan tinggi, antara lain tersusunnya dokumen rencana pengembangan yang lebih sistematis dan kontekstual sebagai rujukan substantif bagi RPJMG dan RKP Gampong, meningkatnya kapasitas perencanaan serta kesepahaman arah pengembangan melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai lembaga dan kelompok masyarakat, serta penguatan integrasi Tridharma melalui model studio-based community service yang memperkaya pembelajaran kontekstual bagi dosen dan mahasiswa. Namun demikian, kegiatan ini juga memiliki dampak negatif dalam bentuk keterbatasan, khususnya keterbatasan waktu dan intensitas pendampingan yang menyebabkan mekanisme implementasi dan monitoring rencana belum sepenuhnya mengakar di tingkat gampong, dokumen masih berstatus sebagai intermediate planning document yang menunggu adopsi formal, serta belum dilakukannya pengukuran longitudinal terhadap perubahan modal sosial, sehingga dampak jangka panjangnya belum dapat dinilai secara empiris.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pengabdi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Gampong Meunasah Tuha, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan izin serta fasilitas sehingga kegiatan pengabdian dan proses penyusunan rencana pengembangan gampong dapat terlaksana dengan baik. Penghargaan yang setulusnya juga disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparatur gampong, tokoh masyarakat, pengurus lembaga-lembaga gampong, pelaku UMKM, dan mahasiswa yang berpartisipasi aktif, sehingga kegiatan pengabdian dan penyusunan artikel ilmiah ini dapat terselesaikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2014.
- [2] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2014.
- [3] Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, *Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong*. 2020.
- [4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Peukan Bada dalam Angka 2024*. Jantho: BPS Kabupaten Aceh Besar, 2024.
- [5] Pemerintah Gampong Meunasah Tuha, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Meunasah Tuha Tahun 2018–2023,” 2018.
- [6] Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, “Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012–2032. Jantho,” 2012.
- [7] R. Chambers, “Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience,” *World Dev.*, vol. 22, no. 9, pp. 1253–1268, 1994.
- [8] R. D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. . Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
- [9] P. Bourdieu, “The forms of capital,” in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*: J. G.

- [10] Richardson, Ed., New York, NY: Greenwood Press, 1986, pp. 241–258.
- [10] G. Syammi, “Profil sokaial capital: Suatu kajian literatur,” *J. Bisnis dan Ekon.*, vol. 17, no. 2, pp. 174–182, 2010.
- [11] J. S. Coleman, “Social capital in the creation of human capital,” *Am. J. Sociol.*, vol. 94, no. suppl., pp. S95–S120, 1988.
- [12] T. Claridge, “Theory of capital,” Bourdieu on social capital. [Online]. Available: <https://www.socialcapitalresearch.com>
- [13] I. Caisarina, E. Zuraidi, M. A. Yusuf, and S. Z. Fakhrana, “Penguatan Perencanaan Berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA) di Gampong Leungah Aceh Besar,” *Pengabd. Inov. Sains*, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2025.